



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
UNIT KERJA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MUKTI**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN**
3. NHK : **733297**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 4.635.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1000 m2/600 m2 di KOTA JAMBI ,
HASIL SENDIRI Rp. 1.040.000.000
2. Tanah Seluas 6300 m2 di MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp.
1.020.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1000 m2/500 m2 di KOTA JAMBI ,
HASIL SENDIRI Rp. 1.550.000.000
4. Tanah Seluas 1883 m2 di MERANGIN, HIBAH DENGAN AKTA Rp.
160.000.000
5. Tanah Seluas 13968 m2 di MERANGIN, HIBAH DENGAN AKTA
Rp. 140.000.000
6. Tanah Seluas 14008 m2 di MERANGIN, HIBAH DENGAN AKTA
Rp. 135.000.000
7. Tanah Seluas 19970 m2 di MERANGIN, HIBAH DENGAN AKTA
Rp. 220.000.000
8. Tanah Seluas 12960 m2 di MERANGIN, HASIL SENDIRI Rp.
110.000.000
9. Tanah Seluas 10430 m2 di MERANGIN, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000
10. Tanah Seluas 20049 m2 di MERANGIN, HASIL SENDIRI Rp.
160.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 308.000.000

1. MOBIL, MITSHUBISI SPORT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
300.000.000



2. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	800.051.458
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.743.051.458
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.743.051.458

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.